

RENCANA AKSI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(DPUTARU)

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

A	Pendahuluan	2
B	Dasar Hukum	2
C	Perjanjian Kinerja (PK) DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2025	4
D	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2025	5
E	Penutup.....	6
	Lampiran Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2025	

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025**

A. Pendahuluan

Rencana aksi kinerja adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja per satuan tahun. Rencana aksi meliputi sasaran dan indikator kinerja utama dengan target yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan rencana aksi pada dasarnya akan memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal karena secara rinci telah direncanakan target sekaligus waktu pencapaian kinerja per triwulan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

C. Perjanjian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2025

DPUTARU Kabupaten Rembang pada tahun 2025 menyusun Perjanjian Kinerja dengan 5 (Lima) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja, sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan target kinerja pada tahun 2025. Pelaksanaan perjanjian kinerja didukung dengan 9 (sembilan) program. Rincian dari Perjanjian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel C.1
Perjanjian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks aksesibilitas jalan	0,52
2.	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks aksesibilitas layanan dasar	79,20
3.	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan air baku	60
4.	Meningkatnya perwujudan rencana tata ruang daerah	Capaian perwujudan program rencana tata ruang	9
5.	Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan serta layanan jasa konstruksi	Persentase Pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi	50

No.	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 10.797.312.692	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp. 21.875.000.000	APBD
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 5.122.369.000	APBD/ APBN

No.	Program		Anggaran	Ket.
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	825.000.000	APBD
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	3.238.000.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp.	5.000.000.000	APBD
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	103.302.631.000	APBD/ APBN
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	12.000.000	APBD
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	75.000.000	APBD

Sumber : Perjanjian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2025

D. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2025

Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan memperhatikan strategi pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Pada Tahun 2025 rencana aksi yang disusun meliputi pencapaian sasaran strategis dengan 9 (Sembilan) program yang dilaksanakan guna mencapai target di Tahun 2025.

E. Penutup

Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 sekiranya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengawal sekaligus menilai keberhasilan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dengan tersusunnya rencana aksi dimaksud maka diharapkan pada segenap pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang untuk dapat bekerja secara optimal sesuai rencana waktu dan target yang telah ditetapkan.

Rembang, Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
REMBANG



MARYOSA, A. TD., MT.

Pembina Utama Muda
NIP 19671211 199003 1 007

LAMPIRAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN
KINERJA DPUTARU KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												TARGET KINERJA				PENANGGUNG JAWAB
						TW I			TW II			TW III			TW IV			TRIWULAN				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	
			Program penataan bangunan gedung	Persentase jumlah bantuan teknis bangunan gedung	100%															100%	KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN BINA JASA KONSTRUKSI	
			Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten /kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Persentase jumlah bantuan teknis bangunan gedung	100%															100%	KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN BINA JASA KONSTRUKSI	
			Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase jumlah bantuan teknis penataan bangunan gedung dan lingkungannya	35%															35%	KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN BINA JASA KONSTRUKSI	
			Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah bantuan teknis penataan bangunan gedung dan lingkungannya	35%															35%	KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN BINA JASA KONSTRUKSI	
			Program Pengembangan jasa konstruksi	Pertumbuhan ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi	10%															10%	KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN BINA JASA KONSTRUKSI	
			Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase jumlah usaha konstruksi sesuai peraturan dan standar	10%															10%	KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN BINA JASA KONSTRUKSI	
6		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik		Nilai Sakip OPD DPUTARU	72,72															72,72	SEKRETARIS DINAS	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												TARGET KINERJA				PENANGGUNG JAWAB
						TW I			TW II			TW III			TW IV			TRIWULAN				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD DPUTARU	72,72															72,72	SEKRETARIS DINAS	
				Nilai IKM OPD DPUTARU	83,69															83,69	SEKRETARIS DINAS	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%															100%	SEKRETARIS DINAS	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%															100%	SEKRETARIS DINAS	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%															100%	SEKRETARIS DINAS	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100%															100%	SEKRETARIS DINAS	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%															100%	SEKRETARIS DINAS	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik	95%															95%	SEKRETARIS DINAS	

Rembang, Januari 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG



MARYOSA, A.TD., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19671211 199003 1 007